

BAB V

KESIMPULAN

Berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan kondisi internasional berubah dari yang tadinya bersifat bipolar, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu masing-masing saling bersaing memperebutkan kekuasaan menjadi satu-satunya penguasa dunia. Pada masa Perang Dingin, senjata nuklir menjadi tren bagi negara-negara besar untuk saling berlomba memperkuat pertahanan dan keberadaannya. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, senjata nuklir tidak lagi menjadi prioritas utama sebagian negara-negara nuklir karena perhatian mereka lebih difokuskan pada perekonomian yang sempat terpuruk akibat perang dan biaya besar yang dikeluarkan.

Perancis sebagai salah satu negara nuklir dunia dengan keputusannya untuk meningkatkan sistem pertahanan telah menimbulkan kontroversi di dunia. Di mana semua negara saling berkampanye untuk melucuti, mengurangi dan memusnahkan senjata nuklir, Perancis justru memodernisasi senjata nuklirnya dan melakukan uji coba yang sebelumnya sempat dihentikan.

Senjata nuklir memang sudah menjadi prioritas utama pertahanan Perancis yang telah diterapkan lebih dari 30 tahun. Sejak masa pemerintahan Republik Kelima yang dipimpin oleh Charles de Gaulle, Perancis telah memutuskan untuk mandiri dalam hal pertahanan dan keamanan. Saat itu Amerika Serikat memang menjadi payung nuklir bagi Eropa Barat. Hal inilah yang meresahkan Perancis, karena seperti diketahui sejak dahulu Perancis telah berambisi untuk menjadi penguasa Eropa

namun karena keberadaan Amerika Serikat yang mendominasi Eropa, Perancis berusaha untuk berdiri sendiri dan menjadi kekuatan otonom terlepas dari Eropa. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Perancis dari kekuatan aliansi NATO.

Keputusan untuk melanjutkan program nuklirnya didasari oleh beberapa hal, pada masa Perang Dingin, Perancis merasakan bahwa Amerika Serikat telah berlaku tidak adil dengan membatasi Perancis untuk memiliki senjata nuklir namun memberikan kesempatan bagi negara tetangganya, salah satunya Inggris untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada awal tahun 1990-an, di bawah pemerintahan Mitterand, Perancis sempat membekukan kegiatan nuklirnya dan ikut menandatangani moratorium bersama negara nuklir lainnya kecuali China dengan maksud untuk menjaga kerukunan antar negara nuklir dunia. Namun, ketika Chirac berkuasa tahun 1995, dalam kepemimpinannya yang belum genap 100 hari, Chirac memutuskan untuk membatalkan moratoriumnya dan kembali melanjutkan program nuklir Perancis.

Konsep deterens yang muncul pada masa Perang Dingin yang dianggap tidak relevan dan populer lagi saat ini ternyata masih digunakan oleh Perancis. Bagi Perancis, kewaspadaan untuk menjaga integritas dan stabilitas negaranya dari kemungkinan ancaman dari luar harus tetap dijaga. Penangkalan dilakukan dengan cara memperkuat sistem persenjataannya. Peningkatan sistem dalam hal ini bukan hanya dilihat dari kuantitas senjata nuklir, namun lebih pada kualitas persenjataan. Selain itu, perubahan-perubahan juga dilakukan dalam kebijakan keamanan dan pertahanan Perancis. Semua itu dilakukan untuk tetap menjaga posisi Perancis dan

Perancis merasa perlu untuk kembali memodernisasi arsenal nuklirnya disebabkan oleh beberapa hal. Dalam hal ini nuklir sebagai alat deterens untuk menangkal semua ancaman masih menjadi prioritas utama. Kekhawatiran akan kebangkitan Jerman merupakan salah satu sebabnya. Trauma sejarah yang pernah terjadi antara Perancis dan Jerman, di mana Jerman pernah beberapa kali mengalahkan Perancis dalam perang, yang telah menghancurkan supremasi yang selama ratusan tahun dipertahankan, telah membuat Perancis terus bersikap waspada terhadap Jerman. Selain memperkuat dan menunjukkan kekuatan senjata nuklirnya, Perancis juga menjalin kerja sama yang erat dengan Jerman yang dimaksudkan untuk tetap mengetahui dan menjaga agar pengalaman masa lalu tidak terulang kembali.

Perancis mengetahui bahwa posisinya sebagai negara besar (*great power*) harus tetap dipertahankan, karena itu Perancis tetap mempertahankan kemandiriannya. Di sisi lain, Perancis tidak ingin dikucilkan di kawasan regionalnya, karena itulah Perancis tetap aktif dalam berbagai kerja sama di organisasi kawasan yaitu Uni Eropa dan mulai merubah kebijakannya dengan masuk kembali dalam struktur NATO namun tetap berdiri sendiri dalam hal kemandirian nuklirnya.

Kondisi dunia juga telah berubah. Saat ini kemampuan untuk mengembangkan dan memiliki senjata nuklir bukan lagi merupakan peluang bagi negara-negara besar. Negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki modal cukup untuk mengembangkan senjata nuklir namun memiliki keinginan kuat untuk memiliki senjata nuklir telah menimbulkan ketakutan bagi negara-negara nuklir itu sendiri. Penjualan gelap senjata nuklir telah menjadi rahasia umum. Dari hal ini dapat dimungkinkan bahwa senjata nuklir bisa dikembangkan oleh semua pihak

termasuk teroris. Jaringan teroris yang semakin berkembang dan berubah seiring waktu, telah terbukti beberapa kali menggunakan bom dari yang berkekuatan kecil hingga skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar Perancis. Tahun 1990-an Perancis sempat beberapa kali terancam oleh teroris. Karena itulah, Presiden Chirac mengeluarkan pernyataan tegas untuk menindak sekecil apapun tindakan terorisme dan bila diperlukan, selain senjata konvensional, kekuatan nuklirnya akan digunakan untuk menghadapi ancaman terorisme.

Senjata nuklir akan tetap menjadi kontroversi dan usaha-usaha yang dilakukan oleh dunia untuk melucuti dan menghilangkan senjata nuklir tidak akan pernah terwujud jika masih ada negara yang memiliki senjata nuklir. Keberadaan rezim non-proliferasi nuklir, NPT lebih banyak memberi kelonggaran pada negara-negara nuklir tetapi menekan negara-negara NNWS lain. NPT dianggap sebagai tempat bagi negara-negara nuklir untuk menjaga agar kekuatan nuklir tidak bertambah. Setelah berakhirnya Perang Dingin, keamanan nasional suatu negara tidak lagi ditafsirkan semata-mata dalam pengertian militer saja, tetapi melibatkan berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Oleh sebab itu, tidaklah sulit untuk dipahami jika peranan sistem persenjataan, termasuk senjata nuklir dan pemusnah massal lainnya mengalami marginalisasi. Namun sejauh menyangkut ancaman luar, ada satu hal yang tidak berubah. Sistem persenjataan nuklir maupun non-nuklir tetap dianggap suatu instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu dan banyak pihak percaya bahwa persenjataan, khususnya nuklir sebagai aspek deterens, dengan segala dampak yang ditimbulkannya di masa sekarang dan akan datang, tetap memainkan